

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Implementasi otonomi terhadap lembaga pendidikan terwujud dalam *School Based Management* atau Manajemen Berbasis Sekolah. Dikarenakan Manajemen Berbasis Sekolah ini adalah upaya kemandirian, kreativitas sekolah dalam peningkatan kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam peningkatan mutu melalui kerjasama atau pemberdayaan pemerintah dan masyarakat, maka diperlukan pula administrasi pendidikan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Bertolak dari penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berupa desentralisasi, maka hal ini berdampak pula terhadap reorientasi Visi dan Misi Pendidikan Nasional yang di dalamnya menyangkut pula tentang Standar Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional, yang berimplikasi pula pada prinsip penyelenggaraan pendidikan, pendanaan, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Hal-hal yang tersebut di atas, terutama dilandasi dengan sifat desentralisasi itu sendiri, mengingat kondisi geografis, sosial-kultural, dan ekonomi setiap wilayah (Propinsi/ Kota/ Kabupaten) yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif, efisien dan berhasil, memerlukan keterkaitan berbagai elemen yang ada khususnya masyarakat (Ashari. 2008:1)

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga pendidikan di era globalisasi dan desentralisasi (otonomi daerah) menuntut *team work* yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun masyarakat. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah,

maka administrasi pemberdayaan masyarakat menjadi kunci sukses di dalamnya. Ketika pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan *out-put* yang berkualitas secara intelektual, spritual dan sosial.

Di sisi lain, implementasi manajemen berbasis sekolah merupakan bagian dari kewenangan satuan pendidikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih optimal, karena selama ini keterlibatan masyarakat belum banyak diperhatikan, maka dalam upaya lebih lanjut, khususnya terkait dengan sukses ujian nasional, masyarakat mutlak perlu diberdayakan secara optimal.

Mengingat mutu pendidikan di Indonesia selama ini kurang memuaskan banyak pihak, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan. Model reformasi yang ditawarkan akhir-akhir ini adalah model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah salah satu bentuk restrukturisasi sekolah dalam pemberdayaan merubah sistem sekolah dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah dalam pemberdayaan merubah desain struktur organisasinya (Susan Albers Mohrman, Priscilla Wohlstetter and Associates, *School-Based Management: Organizing for High Performance*, San Francisco: Jossey Bass, 1994 : 53).

Berdasarkan MBS maka tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu warga sekolah memiliki otonomi dan tanggungjawab

yang lebih besar atas penggunaan sumber daya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah (Yin Cheong Cheng, *School Effectiveness & School-Based Management: A Mechanism for Development*, Washington D.C: The Falmer Press, 1996, h. 44) Model MBS yang diterapkan di Indonesia adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya MPMBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Selain itu dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat (Anonim, 2001: 9-10).

Peran warga sekolah secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh kebijakan manajemen pemerintah, misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi pengelolaan internal sekolah, dan gaya penggunaan sumber daya. Perubahan ke model MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator, guru, orang tua dari yang semula pasif (Nurkholis, 2002: 2).

Terkait kondisi nyata di SMP Negeri 1 Ceper Klaten dalam pengelolaan hubungan dengan masyarakat selama ini belum optimal, khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembelajaran menghadapi ujian nasional, untuk itu menurut penulis masalah ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, yang hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1

Ceper Klaten, penulis mengangkat judul : “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENGHADAPI UJIAN NASIONAL : Studi Situs SMP Negeri 1 Ceper Klaten”.

B. Fokus Penelitian

Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang mengemban tanggung jawab tersebut. Kepala sekolah sangat berpengaruh di lingkungan kerja terutama terhadap guru dan staf administrasi dalam menjembatani hubungan dengan masyarakat. Tugas utama kepala sekolah adalah mendorong para guru dan staf administrasi untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif serta membantu guru tenaga administrasi murid dan orang tua murid untuk mempersatukan kehendak pikiran dengan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, dan melibatkan masyarakat secara optimal.

Tugas pokok pemberdayaan masyarakat antara lain : Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu, membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar, yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi, melaporkan

tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama, menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan, dan mmenunjukkan pergantian keadaan pendapat umum.

Fokus penelitian dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut.

1. Karakteristik pemberdayaan masyarakat dalam proses pembelajaran menghadapi ujian nasional.
2. Karakteristik peran warga sekolah dalam proses pembelajaran menghadapi ujian nasional.
3. Karakteristik sekolah dalam pemberdayaan masyarakat menghadapi ujian nasional.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Mendeskripsikan karakteristik pemberdayaan masyarakat dalam proses pembelajaran menghadapi ujian nasional.
2. Mendeskripsikan karakteristik warga sekolah dalam proses pembelajaran menghadapi ujian nasional.
3. Mendeskripsikan karakteristik sekolah dalam pemberdayaan masyarakat menghadapi ujian nasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki signifikansi secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoretis dalam khasanah pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan khususnya

tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu ujian nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, dapat digunakan sebagai bahan kajian akan masyarakat dalam meningkatkan mutu ujian nasional.
- b. Bagi sekolah khususnya kepala sekolah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang warga sekolah dalam meningkatkan mutu ujian nasional.
- c. Bagi *stakeholders* pendidikan, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu ujian nasional

E. Definisi Istilah

1. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah. Dalam ilmu sosiologi kita kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya.
2. Kata sekolah berasal dari bahasa latin: *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu

adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan scola anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas.

3. Pemberdayaan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dalam pemberdayaan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.